

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Alokasi Anggaran : Rp. 24,775,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi persaingan era globalisasi, menuntut peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk tanggap dan memiliki kesiapan dalam mengantisipasi dampak dari globalisasi ini. Oleh karena itu menyiapkan kecerdasan masyarakat yang berkualitas, merupakan faktor penentu yang sangat penting dan strategis dalam menjaga eksistensi masa depan bangsa dan negara yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi, termasuk yang paling berat yaitu ancaman disintegrasi bangsa.

Menyadari konstelasi geografis dan pluralisme bangsa, sesungguhnya pembangunan wawasan kebangsaan adalah merupakan fondasi, dimana akan diletakkan dasar-dasar semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu tujuan politik yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh suatu negara, khususnya negara kebangsaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kiranya tujuan yang lebih luhur, seperti terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mustahil akan tercapai.

Oleh karena itu, diharapkan setiap elemen bangsa dapat bersama-sama dan tanpa hentinya melakukan upaya positif yang berkelanjutan, demi selalu terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Ketahanan dan kewaspadaan nasional serta rasa nasionalisme yang tinggi, sikap berbangga dan rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia merupakan hal yang mutlak dimiliki setiap generasi terutama generasi muda, sebagai penerus tongkat setafet perjuangan bangsa yang sudah demikian jauh. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam bersikap dan bertindak laku, sehingga hal-hal yang menjurus pada terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat dihindari.

Kebijakan Pemantapan Ideologi dan pembangunan wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa diarahkan pada langkah-langkah kongkrit bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian aktualisasi Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah merupakan partisipasi kebangsaan secara nyata oleh setiap warga bangsa dan komponen bangsa, atau sebagai indikator berperannya (memberikan kontribusi) dalam membangun bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah nyata tentang pentingnya Pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, perlu dilaksanakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di jajaran Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

B. DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Aparatur Badan/Kantor

Kesbangpol Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tentang pentingnya penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini adalah, agar masyarakat Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota memperoleh data dan memahami tentang pentingnya pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah :

- a. Mendapatkan data yang akurat dari Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota tentang kegiatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan Aparatur Badan/kantor Kesbangpol kabupaten/Kota tentang pentingnya penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Kabupaten/Kota

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini adalah mendapatkan data dari masyarakat dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota di Daerah Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Koordinasi secara langsung kepada Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumbar menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

C. PELAKSANAAN

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
 - a. Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk Tahun 2025 untuk 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
 - b. Rapat Koordinasi dengan Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Rapat Koordinasi Peringatan Hari Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Rapat Koordinasi Peristiwa Bersejarah di Provinsi Sumatera Barat.
 - e. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 24.775.000,- (Duapuluh Empat Juta Tujuhratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IV
PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Donny Rahma Saputra, ST, M.Si
NIP. 19780528 200501 1 007